

## **Kajian Sosial Ekonomi Dampak Rencana Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat**

**Ahmad Zaenal Wafik**

Universitas Mataram

[aзаenal\\_wafik@unram.ac.id](mailto:aзаenal_wafik@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak sosial ekonomi dari rencana pembangunan puskesmas di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data primer melalui survei di sekitar wilayah rencana pembangunan puskesmas dan data sekunder terkait permasalahan serta analisis deskriptif terkait dampak sosial ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa rencana pembangunan puskesmas tersebut dinilai dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan wilayah, terutama pada aspek pelayanan kesehatan. Pembangunan puskesmas juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, karena puskesmas memberikan pelayanan promotif dan preventif seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Adapun *multiplier effect* dari dibangunnya puskesmas antara lain dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi pusat layanan sosial bagi masyarakat sekitar.

Kata kunci: Dampak Sosial Ekonomi, Puskesmas, *Multiplier Effect*.

### **Abstract**

*This study aims to determine the socio-economic impact of the public health center development plan in Taliwang District, West Sumbawa Regency. This study uses the method of literature study with primary data collection through surveys around the development plan area, secondary data related to problems as well as descriptive analysis related to socio-economic impacts. This research is conducted in the Bugis Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency. The results of the study indicate that the development plan is considered to be able to provide benefits to the surrounding community and the region, especially in the aspect of health services. The construction of the public health center can also improve public health services because of promotive and preventive services such as immunization, health counseling, and periodic health checks. The multiplier effects of the public health center include increasing access to quality and affordable health services, positively impacting the local economy, improving the quality of human resources, and becoming a social service center for the surrounding community.*

*Keywords: Socio-economic impact, Puskesmas, Multiplier Effect*

## Pendahuluan

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang optimal cenderung terus meningkat. Fenomena ini menuntut pihak penyedia layanan kesehatan untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan di antaranya melalui pengembangan sarana dan prasarana, sistem manajemen, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara bertanggung jawab, aman, berkualitas, adil dan tidak diskriminatif, sehingga hak pasien sebagai penerima layanan Kesehatan terlindungi. Berbagai aspek pembangunan sedang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu diantaranya ialah mengadakan pembangunan pada bidang kesehatan masyarakat. Pembangunan sarana kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, sehingga tercapai terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai tidak hanya bebas dari penyakit, kecacatan dan kelemahan, tetapi sebenarnya adalah kondisi sejahtera mental, fisik, dan sosial yang positif yang memungkinkan orang untuk hidup produktif<sup>1</sup>.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan. Bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional<sup>2</sup>. Namun, permasalahan keterbatasan akses dan pemerataan sarana pelayanan kesehatan sering terjadi pada berbagai daerah dimana daya tampung puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk di sekitarnya. Kondisi ini juga menciptakan persaingan tidak sehat pengguna jasa dalam mendapatkan kesempatan prioritas pelayanan kesehatan, yang berujung pada masyarakat tidak mampu menjadi pihak yang sulit mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Adanya pengaruh dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi sangat signifikan dalam meningkatkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat<sup>3</sup>.

Puskesmas memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dalam menciptakan dampak ekonomi (*multiplier effect*). *Multiplier effect* merupakan suatu keterkaitan langsung dan tidak langsung yang kemudian mendorong adanya kegiatan pembangunan diakibatkan oleh kegiatan pada bidang tertentu baik bersifat positif maupun negatif yang menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain<sup>4</sup>. Dampak ekonomi dalam konteks pembangunan puskesmas mengacu pada dampak yang lebih luas dari investasi dalam infrastruktur kesehatan seperti 1) Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau; 2)

<sup>1</sup> Nasution, I. F. S., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2022). Analisis pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). *Kinerja*, 18(4), 527–532

<sup>2</sup> Ediyar Miharja et.al. (2023). Studi Kelayakan (Fasibility Study) Relokasi UPT Puskesmas Dilang Puti Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat Mulawarman*, 1(1), 10–25.

<sup>3</sup> Yulianti, A., Utoyo, B., & Atika, D. B. (2022). Kinerja Program Nusantara Sehat di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan. *Jurnal Administrativa*, 4(1), 141–156

<sup>4</sup> Sarjanti, E., Rahmawati, N. K., & Sriwanto, S. (2019). Kajian Persepsi Dan Dampak Berganda (Multiplier Effect) Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Lembah. *Prosiding Seminar Nasional Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 244–253

Mengurangi beban biaya kesehatan; 3) Meningkatkan produktifitas tenaga kerja; 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 5) Mendorong pembangunan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, puskesmas berperan dalam membantu masyarakat menjadi lebih sehat, produktif, dan berdaya saing. Lebih lanjut, puskesmas dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Demikian pula dengan pelayanan kesehatan di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi yang terus meningkat, Kecamatan Taliwang dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat 2023, penduduk di Kecamatan Taliwang adalah 56.337 Jiwa.

Dalam hal ini, di Kecamatan Taliwang terdapat Puskesmas Rawat Inap yang didirikan guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Puskesmas Kecamatan Taliwang secara geografi terletak di Jalan Undru, No. 3, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang. Adapun jumlah kunjungan pasien rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Taliwang tahun 2021 sebanyak 22.552 orang yang terdiri dari 10.267 laki-laki dan 12.285 perempuan. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kunjungan sebanyak 24.388 orang yang terdiri dari 10.739 laki-laki dan 13.649 perempuan. Lebih lanjut, jumlah tenaga kesehatan pada puskesmas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan Puskesmas Taliwang, 2022

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	7
2.	Dokter Gigi	1
3.	Apoteker	6
4.	Perawat	70
5.	Perawat Gigi	2
6.	Bidan	84
7.	Nutritions/Gizi	7
8.	Penyuluh Kesehatan	2
9.	Analisis Kesehatan	5
10.	Rekam Medik	1

Sumber : Profil Puskesmas Kecamatan Taliwang, 2022

Bila dirasioikan untuk tenaga kesehatan tahun 2022 di Puskesmas Kecamatan Taliwang, maka didapat rasio tenaga kesehatan terhadap 56.337 penduduk sebagai berikut :

- a. Rasio Dokter umum (7 orang) = 56.337 penduduk
- b. Dokter Gigi (1 orang) = 56.337 penduduk
- c. Rasio Perawat (70 orang) = 56.337 penduduk
- d. Nutrisions/Gizi (7 orang) = 56.337 penduduk
- e. Penyuluh Kesehatan (2 orang) = 56.337 penduduk
- f. Bidan (84 orang) = 56.337 penduduk

Berdasarkan rasio diatas, dapat dilihat bahwa daya tampung dan ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Taliwang. Sehingga diperlukan pembangunan puskesmas baru untuk memberikan ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang merata di Kecamatan Taliwang. Lebih lanjut, hal tersebut

bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya untuk mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019<sup>5</sup>, pada 1 Kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 Puskesmas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Lebih lanjut, pembangunan puskesmas harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Lokasi;  
Aspek lokasi berkaitan dengan kondisi geografis, aksesibilitas jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan lokasi tersebut bukan merupakan jalur atau area SUTT dan SUTET.
- b. Bangunan;  
Aspek bangunan berkaitan dengan administratif, keselamatan, kesehatan kerja serta teknis bangunan. Bangunan puskesmas harus memperhatikan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, dan kemudahan dalam memberi pelayanan. Bangunan dan prasarana harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.
- c. Prasarana;  
Jumlah dan jenis prasarana ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya. Dalam hal ini, prasarana yang dimaksud adalah sistem penghawaan (ventilasi), sistem pencahayaan, sistem air bersih, sanitasi, dan hygiene, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik, sistem proteksi kebakaran, sarana evakuasi, sistem pengendalian kebisingan, kendaraan puskesmas keliling, dan ambulans.
- d. Peralatan;  
Jumlah dan jenis peralatan yang digunakan dapat berubah sesuai dengan perkembangan iptek, kebijakan, kebutuhan, kompetensi, kewenangan, dan ketentuan peraturan. Selain itu, kebutuhan peralatan dapat menyesuaikan dengan alat lain yang fungsinya sama. Semua peralatan yang digunakan harus memiliki kelengkapan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan, standar mutu, keamanan, keselamatan, dan diuji/dikalibrasi secara berkala.
- e. Ketenagakerjaan;  
Adapun jenis tenaga kerja puskesmas antara lain dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan (perawat, bidan, tenaga promkes dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisi, tenaga apoteker, ahli teknologi laboratorium), dan tenaga nonkesehatan seperti ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

informasi, dan kegiatan operasional lainnya. Lebih lanjut, kebutuhan ideal tenaga di puskesmas dihitung melalui analisis beban kerja.

f. Kefarmasian; dan

Aspek kefarmasian berkaitan dengan dibangunnya ruang farmasi dan unit pelayanan tempat penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

g. Laboratorium Klinik.

Ruang laboratorium klinik dibangun untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Laboratorium klinik harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Setelah puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. Maka tahapan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah izin operasional. Berdasarkan Permenkes 43 Tahun 2019, puskesmas yang baru didirikan dan/atau belum memiliki izin operasional, untuk mendapatkan izin operasional pertama kali dapat memenuhi paling sedikit:

a. Persyarata ketenagaan:

- 1) Memiliki Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer (DLP);
- 2) Memiliki 75% (tujuh puluh lima persen) jenis tenaga dokter gigi dan Tenaga Kesehatan lain; dan
- 3) Memiliki Tenaga non-kesehatan

b. Persyaratan peralatan telah terpenuhi paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Menyikapi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berusaha melakukan peningkatan pelayanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas baru guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kecamatan Taliwang. Dalam pembangunan tentunya diperlukan suatu kajian dampak sosial ekonomi. Kajian dampak sosial ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji kebutuhan dan harapan masyarakat akan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

## Metodologi

Metode yang digunakan dalam studi adalah studi literatur. Data yang digunakan yakni data primer (hasil survei di sekitar wilayah rencana pembangunan puskesmas) dan data sekunder (publikasi Badan Pusat Statistik Kecamatan Taliwang)<sup>6</sup>. Studi ini dilakukan di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Khususnya di Kelurahan Bugis yang merupakan lokasi rencana pembangunan puskesmas. Dalam studi ini, aspek yang dikaji adalah dampak sosial ekonomi terhadap rencana pembangunan puskesmas yang ditinjau

---

<sup>6</sup> Alimah, S., Mudjiono, M. (2021). Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Puspitek Serpong. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir

dari beberapa parameter seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat dan *multiplier effect* dari rencana pembangunan puskesmas. Data diolah menggunakan aplikasi spreadsheet excel.

## Pembahasan

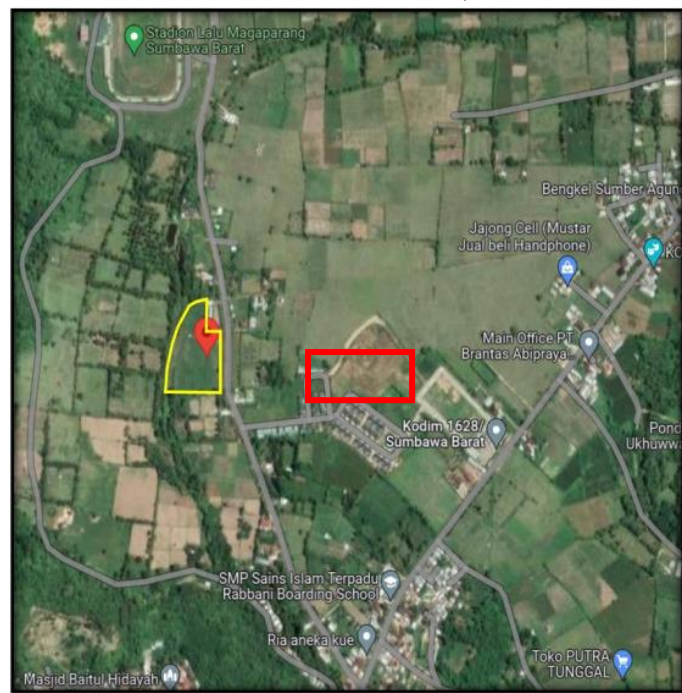
### Gambaran Umum Lokasi Rencana Pembangunan Puskesmas Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Objek studi adalah berupa tanah kosong sesuai dengan Peta Lokasi Rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Taliwang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 dengan tanah yang akan dibebaskan adalah seluas  $\pm 10.141 \text{ m}^2$ .

Objek studi memiliki batas-batas tapak tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah kosong dan bangunan Olah Raga
- Selatan : Tanah Kosong
- Barat : Tanah kosong
- Timur : Jalan Lintas GOR dan Bangunan Gedung Olahraga

Gambar 1. Peta Lokasi Objek Studi



Sumber : *Google Earth Map*, 2023

Objek studi yang dimaksud terletak di Jl. Lintas GOR, lingkungan Muhajirin B RT/RW 006/007, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu terdapat properti yang mudah dikenali yang berdekatan dengan properti atau dalam radius:

- Kurang lebih 80 meter di arah Tenggara dari objek studi terdapat Hunian Asrama Kodim 1628, Sumbawa Barat.
- Kurang lebih 500 meter di arah Utara dari objek studi terdapat Stadion Lalu Magaparang, Sumbawa Barat.
- Kurang lebih 950 meter di arah Tenggara dari objek studi terdapat Kodim 1682/Sumbawa Barat, Taliwang.
- Kurang lebih 1,1 kilometer di arah Selatan dari objek studi terdapat PLN GI Taliwang.

Jalan lingkungan Objek Studi adalah Jl. Lintas GOR, lingkungan Muhajirin B RT/RW 006/007 dengan lebar badan jalan  $\pm 5$  (lima) meter tanpa drainase dengan jenis perkerasan jalan saat ini berupa aspal dengan pemakaian jalur lalu lintas 2 (dua) jalur, 1 (satu) lajur. Berlokasi di pinggiran perkotaan, dengan kepadatan lingkungan kurang lebih 0% - 25%. Pertumbuhan pengembangan di sekitar objek studi relatif stabil, dengan mayoritas hunian adalah pemilik. Kondisi jalan utama objek studi relatif lancar, kemudahan belanja relatif cukup, dengan kemudahan ke fasilitas pendidikan relatif baik. Ketersediaan transportasi publik di sekitar objek studi relatif kurang, dengan penggunaan tanah sekitar sebagai fasilitas publik, Rumah Tinggal, toko, serta lahan pertanian. Jarak dengan pusat keramaian dari objek studi masih sewilayah.

### **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat**

Pembangunan ekonomi daerah adalah upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut<sup>7</sup>. Tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur<sup>8</sup>. Lebih lanjut, Pembangunan ekonomi daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan industri, pertanian, pariwisata, perdagangan, dan investasi<sup>9</sup>. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan pasar<sup>10</sup>.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Untuk mengetahui kelayakan dari sisi ekonomi, maka perlu dilakukan analisis kondisi

---

<sup>7</sup> Roni, D. (2022). Kebijakan Kepala Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4438–4455

<sup>8</sup> Gunawan, H., Program, M., Doktor, S., Hukum, I., Sriwijaya, U., & Belakang, L. (2023). Paarticipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Hukum Uniski*, 12(1), 18–46

<sup>9</sup> Rahman, A. (2023). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 408–421

<sup>10</sup> Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 179–191.

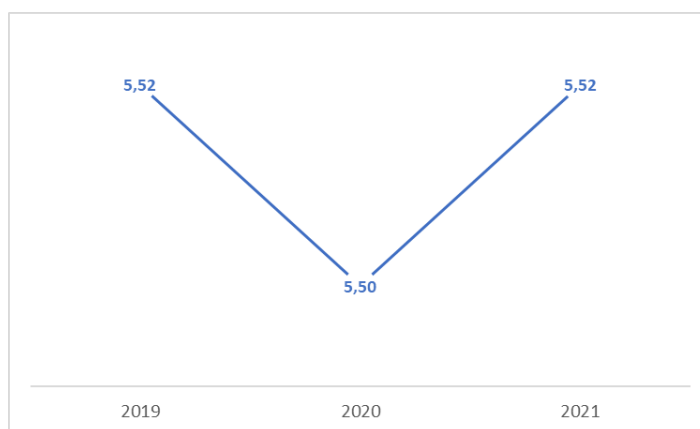
sosial ekonomi masyarakat sekitar Rencana Pembangunan Puskesmas Taliwang II di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indikator sosial ekonomi adalah serangkaian ukuran yang digunakan untuk mengukur status sosial dan ekonomi individu atau kelompok<sup>11</sup>. Dalam praktiknya, indikator sosial ekonomi dapat mencakup berbagai variabel seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan fasilitas tempat tinggal. Setiap indikator tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang status sosial dan ekonomi individu atau kelompok dalam suatu masyarakat.

a) Tingkat Pengangguran

Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dll. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumbawa Barat, 2019-2021



Sumber : Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, 2022

Pada tahun 2019-2021, TPT Kabupaten Sumbawa Barat berada pada kisaran angka 5 persen. Namun, pada tahun 2020 TPT Kabupaten Sumbawa Barat sedikit menurun menjadi 5,50 persen. Walaupun 2020 pandemi Covid-19 melanda, tapi pengangguran mampu turun tipis. Banyaknya pekerja di sektor pertanian tidak terlalu terpengaruh oleh adanya pandemi. Kondisi cuaca yang sudah lebih baik dibandingkan tahun 2019 diduga menjadi salah satu penyebab menurunnya pengangguran. Sementara

<sup>11</sup> Aurelya, T., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 83–92

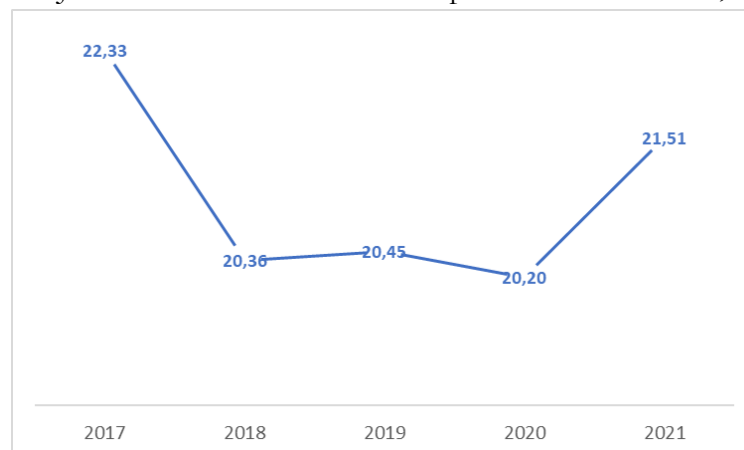


itu, pada tahun 2021, TPT Kabupaten Sumbawa Barat sedikit mengalami peningkatan menjadi 5,52 persen.

b) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain hak akan terpenuhinya kebutuhan pangan, terpenuhinya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, adanya rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kemiskinan dapat muncul karena banyak faktor dan juga menyangkut banyak aspek seperti sosial, ekonomi bahkan budaya sehingga permasalahan kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang multidimensional dimana cukup sulit untuk mengukurnya dan diperlukan adanya suatu kesamaan pandang dalam pengukurannya.

Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumbawa Barat, 2017-2021



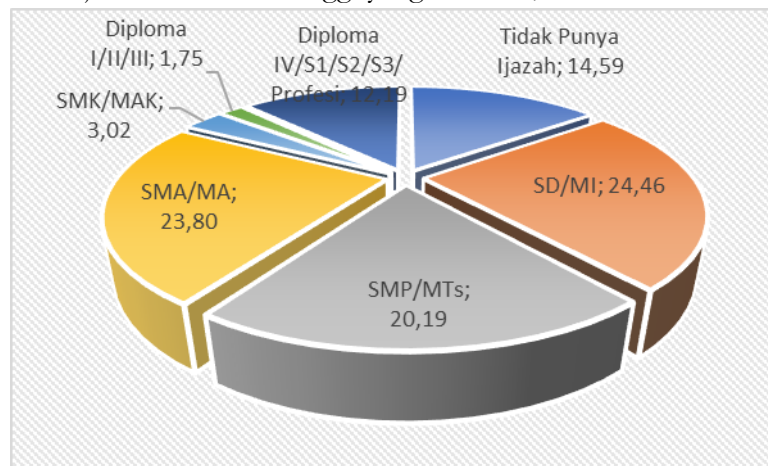
Sumber : Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, 2022

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Sumbawa Barat tahun 2021 mencapai 21,51 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 20,20 ribu jiwa. Lebih lanjut, selama periode 2017-2021, penduduk miskin di Sumbawa Barat menunjukkan tren menurun. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang menggembirakan meskipun para pemangku kebijakan terlihat belum puas dengan capaian tersebut. Berdasarkan data tahun 2017, penduduk miskin Sumbawa Barat 15,96 persen dari total penduduk Sumbawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbawa Barat.

c) Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan kesejahteraan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan tentunya kecenderungan untuk memiliki pendidikan yang tinggi juga semakin tinggi (Saripudin, 2008). Lebih lanjut, Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuan intelektual dan kompetensi yang dimilikinya semestinya juga lebih baik. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator kualitas manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan, diharapkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga semakin meningkat.

Gambar 4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2020



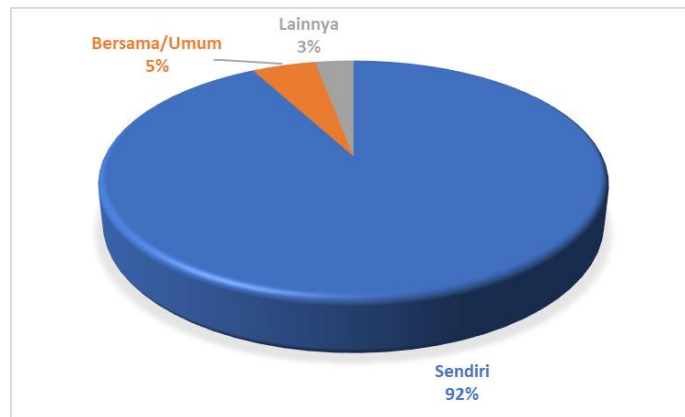
Sumber : Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, 2022

Gambar di atas memperlihatkan persentase penduduk menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didekati dengan Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Terlihat bahwa persentase tertinggi penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA/ Sederajat, yaitu sekitar 26,82 persen. Persentase tertinggi berikutnya adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SD/Sederajat, yaitu sekitar 24,46 persen. Persentase jumlah penduduk yang memiliki ijazah tertinggi setingkat perguruan tinggi, baik diploma, S1, S2, maupun S3 maupun profesi hanya sebesar 13,94 persen. Bahkan terdapat 14,59 persen penduduk yang tidak memiliki ijazah.

d) Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah itu sendiri. Fasilitas tempat tinggal tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan kenyamanan aktivitas sehari-hari, tetapi juga untuk memenuhi standar kesehatan. Beberapa fasilitas tempat tinggal yang sangat diperlukan oleh setiap rumah tangga adalah fasilitas BAB, penerangan, sumber air minum, bahkan juga tempat penampungan akhir tinja.

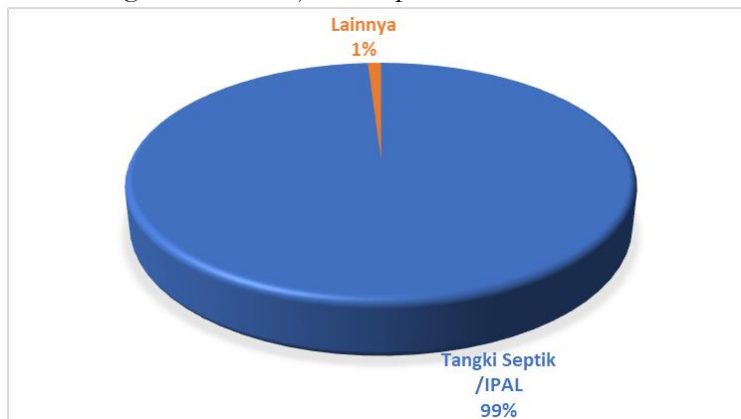
Gambar 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Sumber : Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, 2022

Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat bisa dikatakan merupakan penduduk yang paling sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan. Hal ini cukup beralasan karena pada tahun 2021 sudah ada sebanyak 92 persen rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB. Sedangkan, 5 persen rumah tangga lainnya menggunakan fasilitas buang air besar bersama/umum, dan 3 persen lainnya. Hal ini sejalan dengan keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang berhasil mendapatkan rekor muri dalam menuntaskan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Sumbawa Barat, 2020



Sumber : Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat, 2022

Pada umumnya, masyarakat Sumbawa Barat telah menggunakan tangki septik/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, baik yang beralaskan semen maupun tanah. Hal ini terlihat dari Gambar 6 di atas. Terdapat 99 persen rumah tangga di Sumbawa Barat yang menggunakan tangki septik/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja, sedangkan sisanya menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/ laut/lubang tanah/pantai/tanah lapang/kebun/lainnya. IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain.

### ***Multiplier Effect* Rencana Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat**

Pembangunan selalu identik dengan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan utama suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan diharapkan dapat memberikan masyarakat kualitas hidup yang lebih baik serta perbaikan ekonomi masyarakat serta perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan suatu daerah<sup>12</sup> (Kakambong, 2016).

Dalam hal ini, dampak lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Puskesmas Taliwang di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dapat diketahui melalui *multiplier effect analysis*. Analisis ini juga menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui efek keberlanjutan dari rencana pengembangan untuk wilayah dan masyarakat<sup>13</sup>. Dalam menggunakan konsep *multiplier effect* Domanski &Gwosdz<sup>14</sup>,

<sup>12</sup> Kakambong, A. . (2016). Studi deskriptif tentang multiplier effect pengembangan kawasan industri ngoro pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa lolawang kecamatan ngoro kabupaten mojokerto. *Manajemen Publik*, 4(1)(April), 300–305.

<sup>13</sup> Harris, S. (2013). Pengaruh Keberadaan Kampus Universitas Indraprasta PGRI Terhadap Perkembangan Wilayah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. *Faktor Exacta*, 6(1), 51–69

menyatakan bahwa ada dua basis yang digunakan untuk mengukur multiplier effect seperti jumlah lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan yang diterima. Berdasarkan hasil survei, diperoleh persepsi masyarakat terkait dampak dari rencana pembangunan puskesmas yaitu :

Tabel 2. Potensi Dampak Sosial Ekonomi Rencana Pembangunan Puskesmas

Variabel	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif
Dampak terhadap susunan komunitas	Setuju ( 98%)	Menolak (2%)
Dampak individu dan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kesehatan Individu dan Keluarga</li> <li>• Peningkatan Ekonomi Lokal</li> <li>• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>• Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak lingkungan berupa limbah medis</li> <li>• Konflik sosial akibat penggunaan lahan</li> </ul>

Adapun hasil analisis deskriptif *multiplier effect*, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesehatan masyarakat: Dengan adanya puskesmas, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi tingkat absensi kerja karena sakit, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat di Kecamatan Taliwang.
- b. Peningkatan ekonomi lokal: Pembangunan puskesmas dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan akan barang dan jasa di sekitar puskesmas. Misalnya, adanya peningkatan permintaan akan transportasi publik, tempat tinggal, atau restoran di sekitar puskesmas. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Kecamatan Taliwang.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Dengan adanya puskesmas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing.
- d. Meningkatkan aksesibilitas ke layanan sosial: Puskesmas juga dapat menjadi pusat layanan sosial bagi masyarakat sekitar, seperti program-program sosial dan bantuan kemanusiaan. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke layanan sosial dan membantu memperkuat jaringan sosial di Kecamatan Taliwang.

<sup>14</sup> Bolesław, Domański & Gwoźdz, Krzysztof. (2010). Multiplier Effects in Local and Regional Development. *Quaestiones Geographicae*. 29. 27-37. 10.2478/v10117-010-0012-7.

## Penutup

Daya tampung dan ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Taliwang menyebabkan pembangunan puskesmas baru layak diperlukan untuk memberikan ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang merata di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Pembangunan Puskesmas tersebut dinilai dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan wilayah, terutama pada aspek pelayanan kesehatan. Pembangunan puskesmas dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, karena puskesmas dapat memberikan pelayanan promotif dan preventif seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Adapun *multiplier effect* dari dibangunnya puskesmas antara lain dapat meningkatkan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan akan barang dan jasa di sekitar puskesmas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi pusat layanan sosial bagi masyarakat sekitar, seperti program-program sosial dan bantuan kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

- Alimah, S., Mudjiono, M. (2021). Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Puspitek Serpong. *Prosiding Seminat Nasional Teknologi Energi Nuklir*, (September 2019).
- Aurelya, T., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 83–92. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.752>
- Bolesław, Domański & Gwosdz, Krzysztof. (2010). Multiplier Effects in Local and Regional Development. *Quaestiones Geographicae*. 29. 27-37. 10.2478/v10117-010-0012-7
- Ediyar Miharja et.al. (2023). Studi Kelayakan (Fasibility Study) Relokasi UPT Puskesmas Dilang Puti Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat Mulawarman*, 1(1), 10–25.
- Gunawan, H., Program, M., Doktor, S., Hukum, I., Sriwijaya, U., & Belakang, L. (2023). Paartisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Hukum Uniski*, 12(1), 18–46.
- Harris, S. (2013). Pengaruh Keberadaan Kampus Universitas Indraprasta PGRI Terhadap Perkembangan Wilayah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. *Faktor Exacta*, 6(1), 51–69.
- Kakambong, A. . (2016). Studi deskriptif tentang multiplier effect pengembangan kawasan industri ngoro pada tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa lolawang kecamatan ngoro kabupaten mojokerto. *Manajemen Publik*, 4(1)(April), 300–305.
- Nasution, I. F. S., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2022). Analisis pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). *Kinerja*, 18(4), 527–532.

<https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9871>

- Rahman, A. (2023). Pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 408–421.
- Roni, D. (2022). Kebijakan Kepala Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4438–4455. Retrieved from <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3746>
- Sarjanti, E., Rahmawati, N. K., & Sriwanto, S. (2019). Kajian Persepsi Dan Dampak Berganda (Multiplier Effect) Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata Lembah. *Prosiding Seminar Nasional Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 244–253.
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 179–191. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/804>
- Yulianti, A., Utoyo, B., & Atika, D. B. (2022). Kinerja Program Nusantara Sehat di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan. *Jurnal Administrativa*, 4(1), 141–156.
- “Kabupaten Sumbawa Barat dalam Angka 2023”, dalam <https://sumbawabaratkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/33a3d801d87cab8e3c50428b/kabupaten-sumbawa-barat-dalam-angka-2023.html>. Diakses pada 23 Mei 2023
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040